BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilestarikan untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Nainggolan dkk., 2024). Masalah pencemaran dan perusakan lingkungan bukan lagi masalah lokal, tetapi sekarang menjadi masalah nasional bahkan internasional karena berdampak luas terhadap kehidupan manusia (Azami dan Kustanto, 2023). Terjadinya pencemaran seringkali disebabkan oleh ulah manusia. Adapun faktor yang mampu mensugesti terjadinya pencemaran lingkungan ialah problem pembuangan serta pengelolaan sampah (Firmanda dkk., 2022). Sampah yang dibuang sembarangan berdampak terhadap pola kesehatan masyarakat seperti bau tidak sedap dari sampah yang di buang sembarangan dan asap akibat pembakaran sampah dapat mengganggu kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari (Wulandari dan Rofi'ah, 2023). Sampah yang di buang sembarangan juga dapat mencemari tanah dan air serta menimbulkan berbagai masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar (Erika dan Gusmira, 2024).

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dari data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) pada 2023, per 24 Juli 2024 hasil input dari 290 kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah timbunan sampah nasional mencapai 31,9 juta ton. Dari total produksi sampah tersebut, sekitar 63,3% atau 20,5 juta ton dapat terkelola, sedangkan 35,67% atau 11,3 juta ton sampah tidak terkelola. Sampah yang tidak terkelola ini

menjadi sumber utama pencemaran lingkungan yang berdampak negatif pada berbagai sektor, termasuk kesehatan, ekonomi, dan ekosistem.

Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, saat ini menghadapi krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, terutama terkait persoalan pengelolaan sampah. Masalah ini tidak lagi sebatas isu kebersihan, tetapi telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan. Berbagai bentuk pencemaran lingkungan muncul akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya intervensi struktural dari pemerintah desa dalam mengelola sampah secara terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu manifestasi paling mencolok dari permasalahan lingkungan di Desa Marindal 1 adalah kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan ke dalam aliran sungai buatan atau kanal. Kanal yang seharusnya berfungsi sebagai saluran drainase dan pengendali banjir kini justru dipenuhi oleh tumpukan sampah di sepanjang pinggirannya. Kondisi ini tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga fungsi kanal sebagai bagian dari infrastruktur pengendali air dan sistem sanitasi kota. Kanal yang melintasi wilayah Desa Marindal 1 seharusnya menjadi elemen vital dalam pengelolaan air dan mitigasi bencana banjir, namun telah berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah liar yang tidak resmi. Akibatnya, terjadi pencemaran air, penyumbatan aliran kanal, timbulnya bau tidak sedap, serta meningkatnya risiko banjir saat musim hujan tiba. Situasi ini secara langsung mengancam kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat setempat.

Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang seharusnya disediakan oleh pemerintah desa. Desa Marindal 1 belum memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai dan tidak tersedia sistem pengangkutan sampah secara rutin. Ketidaktersediaan infrastruktur dasar ini membuat masyarakat tidak memiliki alternatif yang layak dalam membuang sampah, sehingga memilih membuangnya ke kanal atau membakarnya di pekarangan rumah. Praktik-praktik tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, seperti infeksi saluran pernapasan, diare, serta penyakit yang ditularkan oleh vektor, seperti demam berdarah dan *leptospirosis*.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk permasalahan lingkungan di Desa Marindal 1. Sebagian besar warga masih menganggap pengelolaan sampah bukanlah hal yang mendesak dan tidak memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, baik ke sungai, selokan, maupun ke lahan kosong, masih banyak ditemukan di lingkungan permukiman warga. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang dari perilaku tersebut terhadap kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Budaya memilah sampah, mendaur ulang, ataupun mengelola sampah secara mandiri belum menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Akibatnya, volume sampah yang tidak terkelola terus bertambah dan menciptakan masalah lingkungan yang kronis. Kesadaran untuk menjaga

lingkungan masih bersifat individual dan belum menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh lapisan Masyarakat (Situmeang dkk., 2023). Kondisi ini menuntut pendekatan strategis yang menanamkan integritas sebagai landasan budaya sadar lingkungan di desa. Integritas membimbing warga untuk konsisten antara nilai dan tindakan, menjadi teladan dalam menjaga etika dan moral. Dengan menerapkan nilai-nilai Kristiani seperti kasih dan keadilan, tercipta komunitas yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan (Berutu, 2024).

Minimnya edukasi lingkungan dari pihak pemerintah desa semakin memperkuat persoalan pengelolaan sampah di Desa Marindal 1. Selama ini, kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah desa atau dinas terkait cenderung bersifat seremonial dan tidak terstruktur dengan baik. Kegiatan tersebut juga tidak dilakukan secara rutin dan tidak menyasar semua lapisan masyarakat secara inklusif, termasuk anak-anak dan remaja. Padahal, edukasi yang berkelanjutan sangat penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Tanpa adanya pendidikan lingkungan yang intensif, upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan berjalan lambat dan tidak berkelanjutan.

Pemerintah desa seharusnya menggandeng sekolah, kelompok pemuda, serta organisasi masyarakat untuk menciptakan program edukasi lingkungan yang konsisten dan relevan dengan kondisi lokal. Pembentukan karakter peduli lingkungan sejak dini dapat menjadi fondasi kuat untuk perubahan perilaku jangka panjang. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang terarah dalam

mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa.

Kondisi ini bertolak belakang dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa pemerintah, termasuk pemerintah desa, memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup (Purba dan Yunita, 2017). Undang-undang ini menegaskan perlunya peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah juga secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat(Aridho, 2024).

Namun, dalam praktiknya, peraturan-peraturan ini belum dijalankan secara optimal di Desa Marindal 1. Pemerintah desa belum sepenuhnya mengambil inisiatif untuk menyusun kebijakan teknis, membentuk tim kerja lingkungan, maupun menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah. Ketidakhadiran peraturan desa (Perdes) yang mengatur teknis pengelolaan sampah juga menjadi hambatan dalam penerapan aturan secara menyeluruh di tingkat lokal.

Salah satu pendekatan strategis yang dapat diadopsi dalam pengelolaan sampah adalah penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Prinsip ini tidak hanya menekankan pada pengurangan volume sampah, tetapi juga mendorong masyarakat untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai

dan mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat (Satria et al., 2024). Pendekatan ini bersifat edukatif karena secara tidak langsung mengajarkan masyarakat untuk lebih bijak dalam konsumsi dan pengelolaan limbah rumah tangga. Namun, penerapan prinsip 3R di Desa Marindal 1 masih sangat minim, bahkan nyaris tidak terdengar dalam program-program pemerintah desa.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya prinsip 3R dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Sosialisasi mengenai prinsip ini juga belum dilakukan secara sistematis kepada masyarakat. Padahal, jika diterapkan dengan serius, 3R dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sistem pengangkutan sampah yang belum tersedia dengan baik.

Keberhasilan desa lain dalam menerapkan prinsip 3R dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran berharga bagi Pemerintah Desa Marindal 1. Salah satu contoh yang patut diteladani adalah Desa Panggungharjo di Yogyakarta, yang berhasil mengelola sampah secara mandiri melalui sistem bank sampah, pengolahan sampah organik menjadi kompos, dan program edukasi lingkungan. Keberhasilan ini didukung oleh kolaborasi antara pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan lembaga pendidikan lokal. Dengan adanya peraturan desa yang tegas, pendampingan berkelanjutan, serta partisipasi aktif warga, Desa Panggungharjo mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pembelajaran dari praktik ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan prinsip 3R di tingkat desa sangat bergantung pada komitmen bersama,

inovasi lokal, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah sejak dari sumbernya (Hidup, 2019). Desa Panggungharjo membuktikan bahwa perubahan perilaku masyarakat dapat terjadi jika pemerintah berkomitmen untuk memberikan fasilitasi, edukasi, dan regulasi yang kuat. Hal ini seharusnya mendorong pemerintah desa untuk mereplikasi model serupa yang disesuaikan dengan kondisi lokal Desa Marindal 1.

Partisipasi aktif masyarakat dalam program lingkungan menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Pemerintah desa perlu memfasilitasi pelatihan, penyuluhan, dan kegiatan lingkungan lainnya yang melibatkan langsung warga. Kegiatan seperti kerja bakti dan pelatihan pengolahan sampah menjadi sarana menumbuhkan kepedulian kolektif warga (Hodriani dkk., 2024). Partisipasi ini mencerminkan semangat gotong royong, di mana setiap individu berkontribusi bagi kepentingan bersama. Gotong royong bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan wujud solidaritas dan tanggung jawab sosial (Dewanti dkk., 2023).

Keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat juga penting dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan budaya terkait kebersihan lingkungan. Masyarakat perlu merasa memiliki terhadap program-program yang dijalankan agar tumbuh rasa tanggung jawab bersama. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis komunitas, sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan akan lebih mudah terwujud. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga membawa manfaat kesehatan, ekonomi, dan sosial bagi seluruh warga Desa Marindal 1.

Permasalahan pengelolaan sampah di Desa Marindal 1 merupakan masalah struktural dan sistemik yang menuntut perhatian serius dari berbagai pihak. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas lokal tidak dapat menyelesaikan persoalan ini secara mandiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah desa, dinas lingkungan hidup, serta masyarakat secara luas dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penyediaan infrastruktur seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sistem pengangkutan sampah yang terjadwal, serta pengawasan terhadap praktik pembuangan liar merupakan langkah teknis yang harus diiringi dengan penguatan regulasi dan kesadaran warga. Penanganan sampah bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga menyangkut kesadaran sosial dan tanggung jawab bersama.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, pengelolaan sampah yang baik mencerminkan karakter kewarganegaraan yang sadar lingkungan. Hal ini menunjukkan pentingnya *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) yang mendorong warga negara untuk memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga lingkungan hidup. Kesadaran kolektif akan pentingnya lingkungan bersih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Dengan demikian, pembentukan warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan merupakan bagian integral dari penguatan karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila (Hodriani dkk., 2023).

Dengan adanya upaya yang lebih terarah dan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, serta pihak terkait lainnya, diharapkan kepedulian masyarakat terhadap

kebersihan lingkungan dapat meningkat. Dengan demikian, Desa Marindal 1 dapat berkembang menjadi wilayah yang lebih bersih, sehat, dan lestari, serta menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah di Desa Marindal 1, Kecamatan Patumbak."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi berbagai masalah seperti :

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.
2. Pencemaran akibat limbah domestik dan sampah rumah tangga akibat dari pembuangan sampah secara sembarangan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang di sediakan pemerintah sehingga memicu pembuangan sampah secara sembarangan.
4. Kurangnya peran aktif pemerintah desa dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pengolaan sampah.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi,maka penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghasilkan pembahasan yang lebih jelas, terperinci dan terarah. Secara keseluruhan penelitian ini dibatasi pada peran pemerintah pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan secara singkat dan juga masalah yang sudah diidentifikasi, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak .
2. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Marindal 1 Kecamatan Patumbak.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memberi manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
    a. Menambah wawasan tentang pengelolaan sampah berbasis pemerintah desa dan partisipasi masyarakat.
    b. Memperdalam pemahaman tentang hubungan antara peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan kepada pemerintah desa tentang cara meningkatkan pengelolaan sampah di Desa Marindal 1.

b. Membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

c. Memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY